

Pengembangan Ekowisata Bahari Pulau Hinako Berbasis Data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Development of Hinako Island Marital Ecotourism in the Hinako Islands Data-Based on Land Tenure, Ownership, Use and Utilization

Uli Nadiya Ulfah,^{1*} & Sutaryono²

¹ Universitas Gadjah Mada, Kota Yogyakarta, Indonesia

² Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Indonesia

*corresponding author: uli.nadiya.ulfah@gmail.com

Submitted: July 22, 2024 | Accepted: September 25, 2025 | Published: September 26, 2025

Abstract: This study integrates P4T data for marine ecotourism planning on Hinako Island. Previously, P4T data on Hinako Island was only used for land management purposes, serving as basic data for planning legalization and land asset management through land redistribution or island consolidation programs. Asset management was followed by community empowerment activities to create new economic resources for the island community to support the development of marine ecotourism. A snapshot of the past economic prosperity of the Hinako Island community, which was once prosperous during the development of the coconut oil processing industry, suggests that the natural resources of naturally growing coconut plantations can be utilized optimally and sustainably. The data collected in this study, especially regarding the availability and number of social and public facilities, can support the development of key infrastructure for ecotourism on Hinako Island.

Keywords: Hinako Island, IP4T Island, Island Land Management, Marine Ecotourism

Abstrak: Penelitian ini mengintegrasikan data P4T untuk perencanaan ekowisata bahari di Pulau Hinako. Data P4T Pulau Hinako sebelumnya baru dimanfaatkan dalam bidang pertanahan yaitu menjadi salah satu data dasar dalam perencanaan kegiatan legalisasi dan penataan aset pertanahan melalui program redistribusi tanah atau konsolidasi pulau. Penataan aset dilanjutkan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan sumber-sumber ekonomi baru bagi masyarakat pulau dalam mendukung pengembangan ekowisata bahari. Gambaran masa lalu ekonomi masyarakat Pulau Hinako yang pernah berjaya pada saat dibangun industri pengolahan minyak kelapa memberikan pandangan bahwa sumber daya alam perkebunan kelapa yang tumbuh secara alami dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan. Hasil pendataan dalam penelitian ini khususnya ketersediaan dan jumlah fasilitas sosial dan fasilitas umum yang disajikan pada penelitian ini dapat menjadi data pendukung dalam membangun infrastruktur utama dalam pengembangan ekowisata di Pulau Hinako.

Kata Kunci: Pulau Hinako, IP4T Pulau, Pertanahan Pulau, Ekowisata Bahari



Jurnal Pertanahan is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Pendahuluan

Daya tarik pulau kecil, umumnya memiliki keunikan dan keindahan yang tersebar di wilayah pesisir dan laut, sehingga kegiatan yang tepat dikembangkan adalah ekowisata bahari (Koroy et al., 2017). Pada umumnya pariwisata memainkan peran penting dalam memberi pengaruh signifikan dalam perekonomian sebagai salah satu pendapatan dan mata pencaharian penduduk setempat di pulau-pulau kecil (Kurniawan et al., 2016). Beberapa pertimbangan yang menjadi fokus ekowisata bahari di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, karena kawasan pulau-pulau kecil merupakan aset wisata bahari yang sangat besar yang didukung oleh potensi geologis dan karakteristik yang mempunyai hubungan sangat dekat dengan terumbu karang. Kondisi pulau-pulau tidak berpenduduk secara logika akan memberikan kualitas keindahan dan keaslian dari biodevesity yang dimilikinya, sehingga sangat menarik untuk dikembangkan sebagai ekowisata bahari seperti diving dan snorkeling (Koroy et al., 2017).

Pulau Hinako adalah pulau utama dengan jumlah penduduk terbesar di gugusan Kepulauan Hinako. Lautan di sekitar Kepulauan Hinako memiliki keindahan terumbu karang dan ombak yang ideal untuk olahraga selancar. Turis mancanegara telah lebih dulu mengakses wilayah tersebut, menciptakan pariwisata eksklusif dengan daya tarik spot diving, surfing dan fishing. Hubungan pariwisata-lingkungan dan, memang, persepsi tentang cara dan sejauh mana sumber daya lingkungan harus dikembangkan atau dieksplotasi untuk pariwisata, sangat tergantung pada skala, ruang lingkup, jenis dan, khususnya, tahap pariwisata. pembangunan di tempat tujuan. Jelas sekali, bentuk-bentuk pariwisata tertentu, seperti pariwisata skala kecil, berbasis masyarakat, 'non-konsumtif', mungkin memiliki dampak yang relatif terbatas pada lingkungan lokal; sebaliknya, pengembangan pariwisata skala besar, atau yang mengakibatkan eksplotasi signifikan atau perubahan lingkungan alam (Sharpley, 2009). Kawasan pariwisata skala kecil dan terkesan eksklusif memang sengaja dibuat oleh pemilik resort selaku stakeholder pengembangan pariwisata di Pulau Asu agar bisa meminimalisasi dampak lingkungan dan mempertahankan kelestarian lingkungan yang masih alami di Kepulauan Hinako. Namun demikian, tidak semua stakeholder memiliki persepsi yang sama terhadap pengembangan kawasan pariwisata. Beberapa penelitian menunjukkan cara bersikap stakeholder terhadap kawasan pariwisata tergantung dengan nilai-nilai yang dianut. Kemungkinan besar, mereka yang menginginkan mendapat manfaat secara langsung dari kawasan pariwisata adalah mereka yang mata pencahariananya bergantung pada pariwisata tersebut, sehingga memandang lingkungan sebagai satu-satunya sumber daya yang bisa dieksplotasi (Sharpley, 2009). Maka dari itu kehadiran pemerintah sebagai agen pengendali dalam pemanfaatan ruang di suatu wilayah dapat memainkan perannya terhadap seleksi stakeholder yang mampu mengembangkan ekowisata bahari.

Untuk membangun Pulau Hinako dengan harapan menumbuhkan perekonomian masyarakat lokal maka perlu pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat. Pengelolaan wilayah pesisir terdiri dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Tahap awal dari proses perencanaan adalah dengan cara mengidentifikasi dan

mendefinisikan isu dan permasalahan yang ada, menyangkut kerusakan sumber daya alam, konflik penggunaan, pencemaran, dimana perlu dilihat penyebab dan sumber permasalahan tersebut. Perlu dorongan motivasi kepada masyarakat pesisir untuk terus menerus melakukan kontrol terhadap setiap pengelolaan wilayah pesisir, perlu memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang ada di sekitarnya, perlu penyediaan data secara sistematis yang berkaitan dengan sumberdaya wilayah pesisir, dan perlu melibatkan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir (Salean, 2017) . Selanjutnya juga perlu diperhatikan sumber daya alam dan ekosistem yang ada yang menyangkut potensi, daya dukung, status, tingkat pemanfaatan, kondisi sosial ekonomi dan budaya setempat seperti jumlah dan kepadatan penduduk, keragaman suku, jenis mata pencaharian masyarakat lokal, sarana dan prasarana ekonomi dan lain-lain (Waluyo, 2013). Untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam tahap awal perencanaan maka perlu dukungan data yang menggambarkan kondisi nyata yang ada di wilayah pesisir, sebagian besar data yang diperlukan dalam tahap awal perencanaan pengelolaan wilayah pesisir tersebut merupakan salah satu keluaran data dari kegiatan inventarisasi data Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan tanah (P4T).

Kegiatan inventarisasi data penguasaan, pemilikan pemanfaatan dan penggunaan tanah yang selanjutnya disebut P4T bertujuan untuk mengetahui informasi pertanahan suatu lokasi. Pada umumnya output kegiatan ini yang berupa data informasi IP4T digunakan sebagai data awal untuk lokasi yang berpotensi untuk program legalisasi asset pertanahan melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap atau Redistribusi Tanah. Dalam penentuan lokasi kegiatan tersebut, kondisi geografis menjadi pertimbangan penting Kantor Pertanahan seperti yang dinyatakan Suhattanto dalam proseding seminar nasional bahwa kondisi geografis yang beragam menyebabkan kondisi sarana transporatsi yang beragam pula, hal ini menyulitkan dalam penentuan standar biaya dan distribusi petugas pertanahan di lapangan (Muh Arif Suhattanto, 2017). Sehingga wilayah pulau-pulau kecil yang jaraknya sangat jauh dari pusat ibukota menjadi salah satu faktor penghambat dalam penentuan lokasi program pertanahan termasuk program Inventarisasi P4T (IP4T). Kegiatan Inventarisasi P4T yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ini sayangnya hanya dimanfaatkan oleh pihak internal saja untuk menunjang kegiatan pertanahan lainnya dan belum pernah dimanfaatkan dalam perencanaan pengembangan wilayah ekowisata bahari. Hal inilah menjadi salah satu motivasi penulis untuk memberikan data informasi khususnya dibidang pertanahan agar dapat ditindaklanjuti dengan program legalisasi asset khususnya dan program pemerintah lain pada umumnya sehingga dapat menumbuhkan kembali perekonomian masyarakat lokal. Legalisasi asset di wilayah perbatasan apalagi kepulauan menjadi sangat penting karena sebagai bukti sah bahwa wilayah tersebut diakui secara administrasi sebagai bagian dari wilayah negara kesatuan Indonesia.

Telah banyak penelitian sebelumnya terkait tema P4T namun belum ada penelitian yang mengaitkan data P4T dengan pengembangan ekowisata bahari dengan lokus wilayah

pulau khususnya Pulau Hinako. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa data IP4T Partisipatif bermanfaat untuk mendukung Pendaftaran Sistematis Lengkap di Kabupaten Madiun (Liliyani et al., 2020). Ini artinya ketersediaan data IP4T secara langsung dapat mendukung kesuksesan pelaksanaan program legalisasi asset pertanahan. Sementara penelitian dengan lokus Pulau Hinako sebelumnya berjudul *The Tourism Development Strategies of Hinako Islands West Nias in Increasing the Regional Revenue and Local People's Welfare* merekomendasikan model pengembangan pariwisata yang terdiri dari 3 (tiga) elemen yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Rekomendasi strategi meliputi strategi pengembangan destinasi wisata, pengembangan industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan lembaga pariwisata (Dewi et al., 2021). Penelitian ini akan mengeksplorasi secara umum kondisi riil dari Kepulauan Hinako dan informasi kondisi pertanahan khususnya di Pulau Hinako dengan wujud data IP4T dengan hasil penelitian berupa Pemanfaatan Data P4T untuk Pengembangan Ekowisata Bahari di Pulau Hinako.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini bersifat kualitatif yang dilaksanakan di Pulau Hinako karena pulau tersebut merupakan pusat pemerintahan di Kepulauan Hinako dan memiliki jumlah penduduk/penghuni terbesar diantara pulau lainnya. Teknik pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari survey, observasi, dokumentasi dan wawancara. Data primer IP4T dan kondisi fasilitas umum Pulau Hinako diperoleh melalui survey dan observasi di lapangan. Data primer sosial ekonomi diperoleh melalui wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan Model Miles dan Huberman, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2013). Hasil penelitian diuraikan secara deskriptif. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara. Informan pada penelitian ini terdiri dari masyarakat, perangkat desa dan pengelola resort di lingkungan Pulau Hinako.

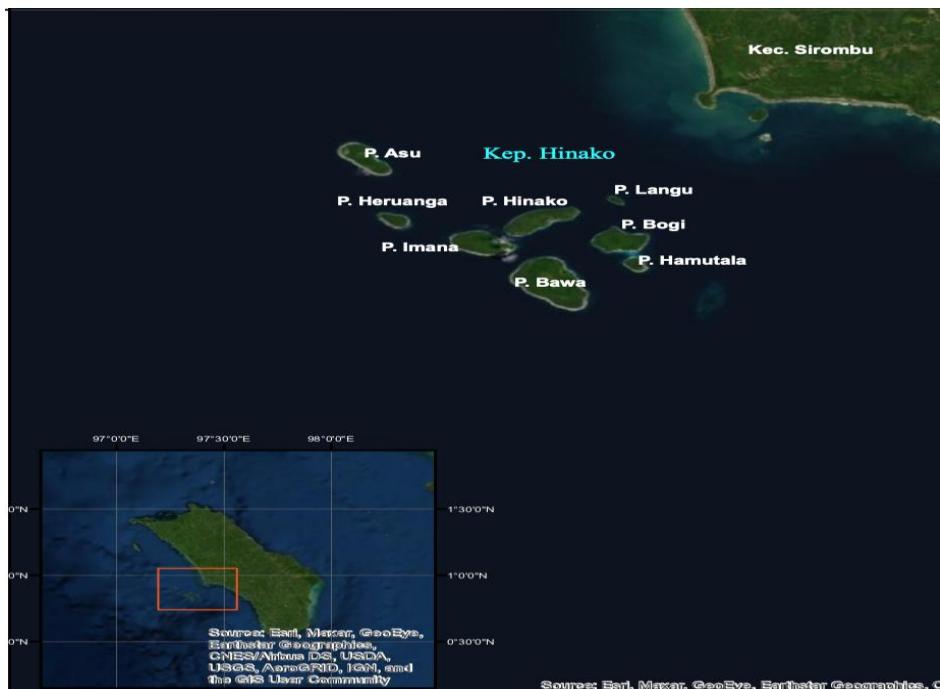
Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum dan Kondisi Pariwisata Pulau Hinako

Ekowisata pertama kali dikenalkan oleh The International *Ecotourism Society* pada tahun 1990 yang mendefinisikan Ekowisata adalah perjalanan bertanggung jawab ke kawasan alami untuk mengonversi lingkungan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat lokal (Asmin, 2014). Lebih lanjut pengertian Ekowisata lebih detil adalah perjalanan ke kawasan rentan, belum terjamah, dan dilindungi namun berdampak rendah dan skala kecil, ekowisata mendidik wisatawan menyediakan dan untuk konservasi, memberikan manfaat langsung bagi pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat lokal dan mengedepankan respek terhadap perbedaan budaya dan hak asasi manusia (Martha Honey dalam Asmin, 2014). Ekowisata adalah suatu wisata berbasis alam yang berupaya melestarikannya secara ekologis, social budaya, dan ekonomi dengan menyediakan kesempatan penghargaan dan pembelajaran tentang lingkungan alami atau unsur-unsur spesifik lainnya.

Ekowisata merupakan jenis pariwisata berkelanjutan yang unik dan bertanggung jawab terhadap bentuk pariwisata yang memperhatikan kelestarian ekologi, tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan serta penurunan kualitas lingkungan (A. Seba, 2019). Sementara ekowisata bahari melibatkan lingkungan wisata bahari meliputi ekosistem pesisir pantai dan laut.

Pulau Hinako merupakan salah satu pulau dari 8 (delapan) gugusan pulau di Kepulauan Hinako yang terletak di sebelah barat Pulau Nias. Gugusan Kepulauan Hinako terdiri dari 8 (delapan) pulau yaitu : Pulau Asu, Pulau Bogi, Pulau Bawa, Pulau Imana, Pulau Hamutala, Pulau Heruanga, Pulau Hinako dan Pulau Langu. Batas-batas wilayah Pulau Hinako adalah sebelah utara : Pulau Nias; sebelah selatan : Pulau Imana; sebelah barat : Samudera Hindia; sebelah timur: Pulau Bogi. Pulau Hinako terletak antara $0^{\circ}30'0''$ - $1^{\circ}0'0''$ Lintang Utara dan $97^{\circ}0'0''$ - $97^{\circ}30'0''$ Bujur Timur. Berdasarkan deliniasi peta citra dan Peta administrasi pada Lampiran Peta RTRW Provinsi Sumatera Utara, Pulau Hinako memiliki luas $\pm 314,37$ Ha. Lebih jelas posisi Pulau Hinako dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Petunjuk Lokasi Pulau Hinako

Sumber : Citra Google Satelite, 2021

Berdasarkan hasil overlay terhadap peta RTRW Kabupaten Nias Barat, arahan fungsi kawasan Pulau Hinako keseluruhan wilayahnya sebagai kawasan pariwisata. Hasil overlay dengan peta kawasan hutan, keseluruhan wilayah Pulau Hinako termasuk dalam arahan kawasan areal penggunaan lain. Di Pulau Hinako sendiri terdiri dari 6 Desa yaitu Desa Halamona, Desa Hanofa, Desa Hinako, Desa Lahawa, Desa Sineneeto dan Desa Balowondrate. Wilayah administrasi desa di Pulau Hinako memiliki keunikan, karena Dusun yang berada dalam satu wilayah desa terletak di pulau yang berbeda. Desa Hinako merupakan ibukota di Pulau Hinako karena paling banyak jumlah penduduknya. Letak dusun di Pulau Hinako dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Desa dan Dusun di Pulau Hinako

No	Desa	Jumlah Dusun	Letak
1.	Halamona	2	1 dusun P. Hinako, 1 dusun di daratan Sirombu
2.	Hanofa	3	1 dusun di P. Hinako, 1 dusun di daratan Sirombu, 1 dusun di P. Asu
3.	Lahawa	2	1 dusun di P. Hinako, 1 dusun di daratan Sirombu
4.	Hinako	2	2 dusun di P. Hinako
5.	Sineneeto	2	1 dusun di P. Hinako, 1 dusun di Daratan Sirombu
6.	Balowandrate	2	1 dusun di P. Hinako, 1 dusun di daratan Sirombu

Sumber : Hasil wawancara Kepala Desa, 2021

Distribusi wilayah dusun di Pulau Hinako yang tersebar ini menyebabkan 5 (lima) kantor desa tidak berfungsi di Pulau Hinako karena Kepala Desa tidak berdomisili di Pulau Hinako melainkan di Sirombu, begitu juga dengan sebagian besar penduduknya. Sehingga penduduk desa dan Kepala Desa bersepakat untuk membuat wilayah dusun yang sama di daratan Sirombu. Hal ini terjadi sejak terjadinya gempa Nias Tahun 2015 yang menyebabkan masyarakat mengungsi dan trauma sehingga meninggalkan Pulau Hinako dan berdomisili di daratan Kecamatan Sirombu. Oleh karena itu, beberapa bangunan rumah di semua desa di Pulau Hinako banyak yang ditinggalkan pemiliknya termasuk fasilitas umum milik pemerintah.

Untuk membangun kawasan pariwisata maka kebutuhan fasilitas sosial dan fasilitas umum harus memadai. Keberadaan fasos dan fasum di Pulau Hinako diperoleh melalui bantuan pemerintah maupun bantuan NGO (*Non Government Organization*). Fasilitas sosial meliputi sekolah, tempat ibadah, gedung pertemuan, mercusuar dan gedung pemerintahan dibangun oleh pemerintah. Fasilitas umum berupa dermaga dan Gudang dibangun melalui dana desa, pembangkit listrik serta sarana prasarana air bersih dibangun oleh NGO. Berdasarkan hasil peninjauan langsung dan hasil wawancara dengan masyarakat di Pulau Hinako diperoleh informasi mengenai jumlah fasos dan fasum yang terdapat di setiap desa Pulau Hinako. Kondisi fasos dan fasum sebagian besar kondisinya rusak atau tidak terawat Hal ini disebabkan sebagian besar aparatur desa di Pulau Hinako tidak berdomisili di Pulau Hinako sehingga mereka tidak memanfaatkan fasilitas desa seperti kantor desa, gedung serba guna dan gudang desa serta fasilitas pemerintahan desa. Sama halnya dengan fasilitas umum lainnya yang diperoleh dari bantuan hibah baik organisasi pemerintah maupun pihak asing yang kondisinya juga tidak terawat dan rusak padahal bantuan-bantuan tersebut jumlahnya cukup memadai untuk masyarakat di Pulau Hinako. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Kondisi Sarana Prasarana Air Bersih dan Listrik

Desa Hinako	Desa Hanofa	Desa Lahawa	Desa Halamona	Desa Sineneeto	Desa Balowondrate
Pos (F)	GSG(TF)	GSG(TF)		GSG(TF)	GSG(TF)
Dermaga(F)	SD	Gereja(F)		Puskesmas(TF)	Balai
Pos Linmas(TF)	Negeri(F)	SMP(F)		1 Kuburan(F)	Desa(TF)

2 Mercusuar (TF)	Gudang(TF) Kantor	Kantor Desa(TF)	Musholla (TF))	Paud(TF)
Puskesmas(TF)	Desa(TF)	Balai	Kantor Desa(TF)	Dermaga(F)
SD Negeri(F)	Dermaga(F)	Desa(TF)	Dermaga(F)	
KantorDesa(TF)		Dermaga(F)		
Tower				
BAKTI(TF)				
2 Gudang				
Desa(TF)				
Syahbandar(TF)				
Bea Cukai(TF)				
PLTS(TF)				
1 Gereja(F)				
1 Masjid(F)				
3 Kuburan(F)				

Keterangan : F : Fungsi, TF: Tidak Fungsi

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2021

Kondisi sarana prasarana air bersih di Pulau Hinako dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Kondisi Sarana Prasarana Air Bersih dan Listrik

No	Nama Desa	Air Bersih		Listrik	
		Pompa Air	Kondisi	PLTS	Kondisi
1.	Halamona	2	1 berfungsi		
2.	Hanofa	6	2 berfungsi		
3.	Lahawa	3	1 berfungsi		
4.	Hinako	9	4 berfungsi	2	Tidak berfungsi
5.	Sineneto	2	0 berfungsi		
6.	Balawondrate	4	1 berfungsi		
Total		26	9		



Gambar 2. Pompa Air Bantuan UNICEF dan Panel Surya di Pulau Hinako

Sumber : Data primer, 2021

Ketersediaan prasarana pompa air sebagai penyedia air bersih merupakan bantuan dari UNICEF. Kondisi pompa air sebagian besar sudah tidak berfungsi, untuk mengatasi kebutuhan air bersih masyarakat membuat sumur galian masing-masing. Untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Hinako dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Hinako, namun tidak berfungsi lagi karena tidak ada perawatan. Sumber listrik rumah tangga

menggunakan panel listrik bantuan pemerintah yang berasal dari hibah NGO Jepang dan dipasang di setiap rumah penduduk namun hanya mampu menghasil energi listrik yang hanya mampu digunakan untuk lampu penerangan rumah. Sementara bagi warga desa yang memiliki kemampuan ekonomi yang memadai memilih untuk membeli mesin diesel berbahan solar demi memenuhi kebutuhan listrik rumahnya masing-masing. Minimnya tenaga dan fasilitas kesehatan puskesmas yang tidak berfungsi secara optimal karena kepala puskesmas tidak berdomisili di Desa Hinako, menyebabkan masyarakat harus menyeberang ke ibukota Kecamatan Sirombu bagi yang membutuhkan perawatan medis yang berat. Untuk perawatan medis ringan cukup diobati secara mandiri oleh warga Pulau Hinako. Kadangkala pemilik resort di Pulau Asu menyediakan peralatan medis yang lebih lengkap untuk kepentingan turis juga mau memberikan pertolongan pertama pada keadaan darurat terhadap masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis.



Gambar 3. Fasilitas Kesehatan/ Puskesmas dan Tower BAKTI
Sumber : Data primer, 2021

Sarana telekomunikasi sebagai penyedia kebutuhan fasilitas jaringan komunikasi masyarakat di Pulau Hinako telah dibangun pemerintah melalui program BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informasi bekerja sama dengan perusahaan swasta sebagai penyedia provider jaringan telekomunikasi. Namun tower yang telah dibangun tersebut kurang memadai karena memiliki keterbatasan sinyal (range/sinyal yang dihasilkan masih rendah). Sehingga masyarakat yang ingin berkomunikasi atau mengakses internet harus pergi ke pesisir pantai pulau untuk memperoleh sinyal yang lebih kuat yang berasal dari tower (BTS) yang ada di Kecamatan Sirombu di Pulau Nias.

Keterbatasan sinyal ini berimplikasi terhadap pertahanan dan keamanan Kepulauan Hinako, apabila terjadi bencana atau kecelakaan pertolongan akan terlambat datang karena jaringan komunikasi yang sangat terbatas. Selain itu, kondisi perairan di Samudera Hindia yang tidak menentu, menyebabkan nelayan yang pergi melaut di sekitar Kepulauan Hinako seringkali mengalami kendala baik disebabkan oleh masalah teknis maupun non teknis (faktor alam), oleh karena itu ketersediaan jaringan telekomunikasi yang memadai merupakan hal yang sangat penting untuk keamanan nelayan.

Prasarana dermaga merupakan infrastruktur utama penyedia aksesibilitas baik untuk masyarakat maupun perdagangan barang dan jasa di daerah kepulauan termasuk di

Kepulauan Hinako. Hilir mudik kapal dari Kepulauan Hinako ke Pulau Nias merupakan rutinitas setiap hari baik untuk mengangkut penumpang, kopra, barang-barang kebutuhan pokok atau lainnya, sehingga keberadaan dermaga yang memadai sangat penting. Kecamatan Sirombu merupakan gerbang akses masyarakat Kepulauan Hinako ke Pulau Nias, namun kondisi dermaganya kurang memadai untuk bersandar kapal-kapal besar. Dermaga Sirombu hanya bisa untuk bersandar kapal-kapal kecil yang bermuatan sedang dan berpenumpang paling banyak 10-20 orang. Tidak ada tangga permanen untuk menggapai kapal melainkan tangga yang ada terkesan darurat dan seadanya (terbuat dari kayu dan tali) sehingga dapat membahayakan penumpang untuk naik turun ke kapal dan barang-barang diangkut secara konvensional oleh kru atau penumpang kapal. Peningkatan kelas dermaga bisa meningkatkan kapasitas kapal yang bisa bersandar di Kecamatan Sirombu sehingga bisa menjadi lebih efisien, semakin besar kapalnya maka akan semakin banyak jumlah muatan yang dapat diangkut. Hal ini berdampak pada biaya pengangkutan barang/orang dengan transportasi kapal. Permasalahan pembangunan daerah kepulauan pada umumnya karena sarana dan prasarana transportasi yang belum memadai, sehingga kebutuhan pokok atau lainnya menjadi mahal.



Gambar 4. Dermaga di Kecamatan Sirombu

Sumber: Data primer, 2021

Di Pulau Hinako sendiri memiliki dermaga sebanyak 3 (tiga) dermaga yang terletak di Desa Hanofa, Desa Hinako dan Desa Balowandrate. Dermaga tersebut dibangun bersumber dari dana desa. Kelas dermaga di Pulau Hinako sama dengan kelas dermaga di Kecamatan Sirombu. Dermaga di Pulau Hinako berfungsi sebagai aksesibilitas masyarakat, barang dan jasa di Pulau Hinako ke Kecamatan Sirombu maupun pulau lainnya dalam gugusan Kepulauan Hinako.



Gambar 5. Dermaga di Pulau Hinako

Sumber : Data primer, 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik resort di Pulau Asu ketersediaan fasilitas pendukung pariwisata berbasis lingkungan seperti bak sampah serta pengelolaan sampah belum ada. Kemudian untuk menciptakan pariwisata maka keamanan menjadi prioritas utama mengingat Kepulauan Hinako terletak di area bebas Samudera Hindia yang bisa saja kemungkinan kapal bisa terdampar atau hilang apabila terjadi badai, maka dari itu fasilitas telekomunikasi merupakan fasilitas pendukung dalam segi keamanan sehingga baik nelayan maupun kapal lainnya bisa tetap melakukan komunikasi dengan pihak keamanan di daratan. Hasil wawancara masyarakat setempat, pada saat terjadi gempa tsunami Tahun 2005 masyarakat di Kepulauan Hinako tidak terjangkau pemerintah Indonesia sendiri karena sistem telekomunikasi terputus. Melainkan pemerintah dari negara lain yang terlebih dahulu merespons dan menyelamatkan para masyarakat di Kepulauan Hinako. Gempa tsunami tersebutlah yang membuka akses bantuan dari organisasi internasional seperti UNICEF bahkan organisasi sosial NGO dari Jepang juga turut hadir. Bantuan yang diberikan berupa pengadaan fasilitas umum seperti pompa air bersih dan panel surya untuk mengatasi kebutuhan listrik di Pulau Hinako. Namun seiring waktu fasilitas bantuan-bantuan tersebut menjadi mangkrak karena rusak dan tidak ada perawatan lebih lanjut. Pemerintah daerah juga tidak memperhatikan hal tersebut karena anggaran yang terbatas menjadikan Kepulauan Hinako bukan wilayah prioritas pembangunan. Masyarakat juga mengalami traumatis sehingga banyak meninggalkan dan berpindah tempat tinggal ke tempat yang mereka anggap lebih aman dari Pulau Hinako. Hal tersebutlah menjadi salah satu penyebab utama banyak bangunan baik permukiman maupun fasos dan fasum terbengkalai tidak terawat.

Pemanfaatan Data P4T Untuk Pengembangan Ekowisata

Kegiatan pengumpulan data P4T merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pengumpulan data dan informasi P4T dalam suatu wilayah sehingga menghasilkan informasi pertanahan yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan program pertanahan. Kegiatan ini juga merupakan amanat TAP MPR Nomor IX Tahun 2011 tentang Pembaharuan Agraria dan

Pengelolaan Sumber Daya Alam khususnya Pasal 6 yang menyatakan bahwa untuk merumuskan Arah Kebijakan Pembaruan Agraria perlu diselenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, di pasal 7 ayat 2 bahwa pelaksanaan redistribusi tanah didahului dengan pelaksanaan tahapan inventarisasi P4T. Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2022 pengertian yang berkaitan dengan kegiatan Data dan Informasi P4T, yaitu:

- a. Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang terbatas;
- b. Penguasaan Tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
- c. Pemilikan Tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan baik yang sudah terdaftar (sertifikat hak atas tanah) maupun yang belum terdaftar;
- d. Pemanfaatan Tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya;
- e. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Analisa P4T di Pulau Hinako diperoleh melalui overlay peta Citra, identifikasi dan wawancara terhadap petugas pendamping desa dan sebagian masyarakat desa di Pulau Hinako dan pengamatan langsung dilapangan. Jumlah bidang tanah yang berhasil diidentifikasi, sebagai berikut :

Tabel 4. Jumlah Bidang yang diidentifikasi di Pulau Hinako

No	Desa	Jumlah Bidang
1	Halamona	61
2	Hanofa	64
3	Hinako	187
4	Lahawa	50
5	Sineneeto	68
6	Balowandrate	81
Total		511

Sumber : Laporan Data Potensi WP3WT Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

Analisa penguasaan tanah diperoleh dari wawancara terhadap petugas pendamping desa. Tabel kondisi penguasaan tanah di Pulau Hinako dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Penguasaan Menurut Jenis

Desa	Penguasaan (bidang)					
	Pemilik	Bkn Pemilik	Bersama	Badan Hukum	Pemerintah	Tdk ada
Halamona	56		2		3	
Hanofa	60				4	
Hinako	169		3		15	
Lahawa	45				5	
Sineneeto	63		2		3	
Balowandrate	78		1		2	

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2021

Pada umumnya seluruh bidang tanah yang di Pulau Hinako dikuasai oleh pemiliknya yaitu masyarakat di Pulau Hinako, sebagian kecil dikuasai bersama seperti tempat ibadah dan kuburan dan sebagian kecil lainnya dikuasai pemerintah kabupaten maupun desa berupa fasilitas sosial dan pemerintahan seperti sekolah, kantor desa, gudang desa, pos di dermaga, mercusuar dan syahbandar. Namun kondisi fasilitas umum di Pulau Hinako sangat memprihatinkan karena banyak yang sudah berfungsi akibat kurang perawatan seperti PLTS, gudang, gedung serba guna kantor syahbandar. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar perangkat desa yang tidak berdomisili di Pulau Hinako.

Analisa struktur penguasaan berdasarkan luas bidang tanah di Pulau Hinako dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Struktur Luas Penguasaan Tanah di Pulau Hinako

No	Kelompok Luas Penguasaan Tanah	Sendiri/Pemilik		Pemerintah		Bersama	
		Σ Bidang	Σ Luas	Σ Bidang	Σ Luas	Σ Bidang	Σ Luas
1	0 - 1 Ha	388	108,94	31	2,67	9	1,71
2	1 - 3 Ha	67	103,14	-	-	-	-
3	3 - 5 Ha	12	39,28	-	-	1	3,69
4	>5 Ha	3	9,25	-	-	2	22,34
	Total	470	260,93	31	2,67	12	27,74

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2021

Luas bidang tanah dari seluruh kelompok luas paling banyak dikuasai oleh sendiri/pemilik yaitu masyarakat. Luas bidang 0 -1 Ha yang dikuasai pemerintah sebanyak 31 bidang dengan jumlah total luas $\pm 2,67$ Ha. Sementara yang dikuasai bersama dengan luas 0 – 1 Ha sebanyak 9 bidang dengan total luas $\pm 1,71$ Ha, luas 3 -5 Ha sebanyak 1 bidang seluas $\pm 3,69$ Ha dan luas lebih dari 5 Ha sebanyak 2 bidang tanah yaitu kawasan pesisir pantai sebelah utara dan selatan dengan total luas $\pm 22,34$ Ha.

Batas administrasi desa di Pulau Hinako sebagian sudah dibangun tugu batas yang memadai sebagian lainnya tidak ada tugu batas. Ketidakjelasan batas administrasi wilayah ini bisa mengakibatkan ketidaktertiban pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan

penguasaan tanah seperti surat pernyataan waris atau surat penguasaan tanah diterbitkan kepala desa yang tidak sesuai dengan wilayah administrasi dimana letak tanah tersebut berada, berimplikasi terhadap buruknya administrasi pertanahan. Menurut wawancara aparatur desa, masyarakat desa juga belum begitu paham dan sadar pentingnya bukti surat penguasaan tanah.



Gambar 6. Batas Desa Hinako dan Desa Halamona Pulau Hinako

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2021

Struktur kepemilikan tanah di Pulau Hinako diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu belum terdaftar yang terdiri dari seluruh tanah yang dikuasai oleh masyarakat seluas $\pm 276,95$ Ha, Hak Pakai Nomor 1/Hinako sebanyak 1 (satu) bidang yaitu milik Sekolah Dasar Negeri 076718 dan tanah negara belum terdaftar yaitu pesisir pantai luas total $\pm 14,22$ Ha. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Luas Pemilikan Tanah di Pulau Hinako

No	Jenis Kepemilikan	Luas (Ha)
1	Belum Terdaftar	276,95
2	Hak Pakai	0,17
3	Tanah Negara Belum Terdaftar	14,22
	Total	291,34

Tabel 8. Struktur Luas Pemilikan Tanah di Pulau Hinako

No	Kelompok Luas Pemilikan Tanah	Belum Terdaftar		Hak Pakai		Tanah Negara Belum Terdaftar	
		Σ Bidang	Σ Luas	Σ Bidang	Σ Luas	Σ Bidang	Σ Luas
1	0 - 1 Ha	398	95,72	1	0,17	29	2,95
2	1 - 3 Ha	67	100,73	-	-	-	-
3	3 - 5 Ha	12	45,69	-	-	1	3,59
4	>5 Ha	4	34,81	1	0,17	1	7,68
	Total	481	276,95	1	0,17	31	14,22

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2021

Keseluruhan bidang tanah milik masyarakat di Pulau Hinako belum bersertifikat, sementara SD Negeri di Desa Hinako sudah diterbitkan sertifikat dalam program pensertifikatan aset pemerintah daerah. Data Penggunaan dan Pemilikan Bidang tanah yang telah disajikan pada tabel-tabel di atas bisa dimanfaatkan sebagai data awal dalam perencanaan program pertanahan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan setempat antara lain data potensi program reforma agraria melalui legalisasi aset dengan jenis program redistribusi tanah bagi tanah yang digunakan untuk perkebunan dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk tanah pemukiman, tanah instansi pemerintah melalui legalisasi aset Barang Milik Negara dan untuk kawasan pariwisata yang dikelola baik oleh masyarakat maupun swasta dapat diberikan Hak Guna Bangunan. Kegiatan legalisasi aset ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan dan menghindari sengketa tanah dikemudian hari mengingat potensi dikuasai pihak asing yang cukup tinggi di wilayah ini terbukti dengan adanya pengelolaan resot oleh pihak asing di Pulau Asu. Selain itu, Sertifikat Tanah juga bisa menjadi stimulus perekonomian masyarakat karena bisa dijadikan jaminan yang sah untuk mengambil pinjaman uang di Bank yang bisa bermanfaat sebagai modal usaha masyarakat sektor ekowisata bahari.

Informasi penggunaan tanah di Pulau Hinako diperoleh melalui deliniasi peta citra yang menggambarkan tutupan lahan kemudian diverifikasi dengan pengecekan langsung oleh petugas pada saat kelapangan dan wawancara petugas pendamping desa. Kondisi penggunaan tanah di Pulau Hinako dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Luas Penggunaan Tanah Pulau Hinako

No	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)
1	Dermaga	0.26
2	Gedung	0.38
3	Gereja	0.03
4	Gudang	0.10
5	Kantor/Instansi Pemerintah	0.69
6	Kebun Campuran	28.78
7	Masjid	0.71
8	Mercusuar	0.36
9	Pabrik	0.28
10	Pantai Berbatu	7.68
11	Pantai Berpasir	3.59
12	Pemakaman Umum	1.12
13	Pembangkit Tenaga Listrik	0.13
14	Perkampungan	8.38
15	Perkebunan	237.40
16	Puskesmas	0.08
17	Sekolah	0.63
18	Tanah Terbuka	0.60
19	Tower	0.14
Total Luas		291.34

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh gambaran penggunaan tanah di Pulau Hinako paling luas digunakan sebagai Perkebunan Kelapa seluas $\pm 237,40$ Ha. Kemudian penggunaan tanah kebun campuran seluas $\pm 28,78$ Ha dan perkampungan seluas $\pm 8,38$ Ha. Struktur luas penggunaan tanah di Pulau Hinako dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10. Struktur Luas Penggunaan Tanah Pulau Hinako

No	Jenis Penggunaan	0 - 1 Ha		1 - 3 Ha		3 - 5 Ha		>5 Ha		Total Luas (Ha)	
		Σ Bidang	Σ Luas								
1	Dermaga	1	0.26	-	-	-	-	-	-	1	0.26
2	Gedung	6	0.38	-	-	-	-	-	-	6	0.38
3	Gereja	1	0.03	-	-	-	-	-	-	1	0.03
4	Gudang	5	0.1	-	-	-	-	-	-	5	0.1
5	Kantor/Instansi Pemerintah	8	0.69	-	-	-	-	-	-	8	0.69
			16.8		11.9						
6	Kebun Campuran	47	6	9	2	-	-	-	-	56	28.78
7	Masjid	3	0.17	-	-	-	-	-	-	3	0.17
8	Mercusuar	2	0.36	-	-	-	-	-	-	2	0.36
9	Pabrik	1	0.28	-	-	-	-	-	-	1	0.28
10	Pantai Berbatu	-	-	-	-	-	-	1	7.68	1	7.68
11	Pantai Berpasir	-	-	-	-	-	-	1	3.59	1	3.59
12	Pemakaman Umum	6	1.12	-	-	-	-	-	-	6	1.12
13	Pembangkit Tenaga Listrik	3	0.13	-	-	-	-	-	-	3	0.13
14	Perkampungan	160	8.38	-	-	-	-	-	-	160	8.38
			69.4		82.1		51.8		34.5		
15	Perkebunan	167	8	58	4	11	1	3	1	239	237.9
16	Puskesmas	1	0.08	-	-	-	-	-	-	1	0.08
17	Sekolah	4	0.63	-	-	-	-	-	-	4	0.63
18	Tanah Terbuka	12	0.6	-	-	-	-	-	-	12	0.6
19	Tower	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.14
										291.3	
Total										511	4

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2021

Struktur luas penggunaan tanah paling lengkap kelompok luasnya digunakan sebagai Perkebunan. Luas bidang 0 -1 Ha sebanyak 160 bidang dengan jumlah total luas $\pm 68,94$ Ha, luas 1 -3 Ha sebanyak 58 bidang dengan luas total $\pm 82,14$ Ha, luas 3 -5 Ha sebanyak 11 bidang dengan luas total $\pm 82,14$ Ha dan luas lebih dari 5 Ha sebanyak 3 bidang dengan luas total $\pm 34,51$ Ha.

Tanaman Kelapa yang tumbuh di Pulau Hinako merupakan vegetasi alami yang tumbuh secara alami di pulau dan buahnya dipanen oleh masyarakat Pulau Hinako. Hasil tanaman kelapa diolah menjadi kopra yang kemudian dijual di Sirombu. Tanah yang ditanami tanaman ubi, pepaya dan tanaman lain selain kelapa dianggap penggunaan tanah kebun campuran. Identifikasi penggunaan tanah kawasan wisata ditandai dengan adanya pondok-pondok di pesisir pantai sementara untuk sementara penggunaan tanah sumber daya pesisir berada di

pesisir pantai yang memiliki potensi baik dikembangkan sebagai kawasan wisata maupun budidaya perikanan maupun sumber daya laut lainnya namun belum dikelola. Dokumentasi penggunaan tanah di Pulau Hinako dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 7. Penggunaan Tanah Pemukiman, Perkebunan Kelapa dan Sumberdaya Pesisir

Sumber : Data Primer, 2021

Pemanfaatan tanah di Pulau Hinako terdiri dari 10 (sepuluh) klasifikasi, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11. Pemanfaatan Tanah Pulau Hinako

No	Jenis Pemanfaatan	Luas
1	Fasilitas Kesehatan	0.08
2	Fasilitas Pemerintahan	0.69
3	Fasilitas Pendidikan	0.63
4	Fasilitas Peribadatan	0.74
5	Fasilitas Transportasi	0.26
6	Instalasi Komunikasi	0.14
7	Pemanfaatan Untuk Fasos/Fasum	2.08
8	Pemanfaatan Untuk Tempat Tinggal	8.38
9	Pertanian	266.18
10	Tidak Ada Pemanfaatan	12.15
Luas Total		291.34

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2021

Pemanfaatan tanah di Pulau Hinako paling luas dimanfaatkan sebagai tanah pertanian seluas $\pm 266,18$ Ha, tidak ada pemanfaatan seluas $\pm 12,15$ Ha, pemanfaatan untuk tempat tinggal seluas $\pm 8,38$ Ha dan pemanfaatan untuk fasilitas sosial dan umum seluas $\pm 2,08$ Ha. Struktur luas pemanfaatan tanah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12. Struktur Luas Pemanfaatan Tanah Pulau Hinako

No	Jenis Penggunaan	0 - 1 Ha		1 - 3 Ha		3 - 5 Ha		>5 Ha		Total Luas (Ha)		
		Σ	Bidang	Σ	Bidang	Σ	Bidang	Σ	Bidang	Σ	Bidang	Σ
		Luas		Luas		Luas		Luas		Luas		Luas
1	Fasilitas Kesehatan	1	0.08	-	-	-	-	-	-	1	0.08	
2	Fasilitas Pemerintah	10	1.19	-	-	-	-	-	-	10	1.19	
3	Fasilitas Pendidikan	4	0.63	-	-	-	-	-	-	4	0.63	
4	Fasilitas Peribadatan	4	0.74	-	-	-	-	-	-	4	0.74	
5	Fasilitas Transportasi	2	0.26	-	-	-	-	-	-	2	0.26	
6	Instalasi Komunikasi	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.14	
7	Pemanfaatan Untuk Fasos/Fasum	20	1.99	-	-	-	-	-	-	20	1.99	
8	Pemanfaatan Untuk Tempat Tinggal	160	8.38	-	-	-	-	-	-	160	8.38	
9	Pertanian	205	85.4	67	94.0	11	51.81	3	19.8	286	251.1	
10	Tidak Ada Pemanfaatan	24	0	-	6	-	-	1	5	25	2	
					12.1					14.6		26.81
										6		
	Total									513	291.3	4

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2021

Struktur luas pemanfaatan tanah sama halnya dengan struktur luas penggunaan tanah yaitu paling lengkap kelompok luas untuk pemanfaatan pertanian yaitu: luas bidang 0 -1 Ha sebanyak 205 bidang dengan jumlah total luas ±85,40 Ha, luas 1 -3 Ha sebanyak 67 bidang dengan luas total ±94,06 Ha, luas 3 -5 Ha sebanyak 11 bidang dengan luas total ±51,81 Ha dan luas lebih dari 5 Ha sebanyak 3 bidang dengan luas total ±19,85 Ha.

Peruntukkan rencana tata ruang di Pulau Hinako berdasarkan RTRW Kabupaten Nias Barat Peraturan Daerah Nias Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Barat Tahun 2014 – 2034 dan lampiran Peta Kawasan Hutan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8088 Tahun 2018 adalah Kawasan Wisata dan Areal Penggunaan Lain.

Untuk penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan arahan fungsi kawasan wisata seperti pemukiman, perkebunan kelapa atau kebun campuran tidak menjadi permasalahan sepanjang penggunaannya tidak bertentangan dan dapat mendukung arahan peruntukkan ruang. Di dalam kawasan wisata terdapat pemukiman sebagai tempat tinggal masyarakat dapat mendukung karena masyarakat yang tinggal bisa diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata. Berdasarkan informasi tersebut maka Pulau Hinako dapat dilaksanakan penataan aset, karena penguasaan dan penggunaan sesuai dengan arahan peruntukkan rencana tata ruang dan kebijakan atau peraturan lainnya.

Telah dibahas sebelumnya, beberapa tempat tinggal, tempat ibadah dan kantor pemerintah banyak yang kondisinya tidak berfungsi dan tidak terawat disebabkan beberapa hal yaitu rusak karena tidak dimanfaatkan atau tidak ada perawatan dari petugas dan

dinggalkan pemiliknya. Dokumentasi beberapa fasilitas umum baik yang dimanfaatkan dan yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya dapat dilihat pada foto di bawah ini:



Gambar 8. Mercusuar di Desa Hinako



Gambar 9. Tempat Tinggal dan Fasilitas Umum yang tidak dimanfaatkan



Gambar 10. Fasilitas Pendidikan SD dan SMP Negeri



Gambar 11. Tempat Ibadah dan Kantor Desa

Data Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang telah disajikan bisa menjadi data dasar dalam perencanaan jenis usaha masyarakat yang bisa mendukung ekowisata bahari. Bawa potensi perkebunan kelapa bisa dikembangkan karena jenis tanah di Pulau Hinako sangat cocok ditanami Tanaman Kelapa terbukti dengan kualitas buah kelapa yang dihasilkan sangat berbeda dengan kelapa jenis lainnya di daratan.

Mata pencaharian masyarakat di Pulau Hinako mencerminkan masyarakat pedesaan yang bersifat homogen. Pada umumnya adalah petani kelapa dan sebagian kecil adalah nelayan. Hasil pertanian pada umumnya adalah kelapa yang diolah menjadi kopra, sebagian kecil hasil pertanian lainnya adalah cengkeh, pisang dan ubi. Kelapa yang sudah diolah masyarakat menjadi kopra kemudian dijual di ibukota Kecamatan Sirombu menggunakan transportasi kapal.

Pada tahun 2007 pernah dibangun pabrik pengolahan kopra menjadi minyak kelapa VCO (*Virgin Coconut Oil*) di Desa Hinako bantuan dari NGO asal Australia. Hasil pengolahan minyak kelapa tersebut dipasarkan di 5 (lima) negara yaitu Australia, India, China, Belanda dan Amerika. Sebagian kecil hasil keuntungan penjualan digunakan untuk operasional Sekolah Paud berbadan hukum Yayasan Indo Jiwa yang dibangun di Desa Hinako. Namun ketika manajemen pemasaran didelegasikan kepada pihak lokal, tata kelola pemasaran menjadi buruk dan kurang pengawasan dari pemilik perusahaan, pada akhirnya pabrik tersebut bangkrut dan sudah tidak beroperasi sejak Tahun 2010.



Gambar 12. Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa

Bantuan pemerintah di bidang pertanian yang pernah diberikan terhadap masyarakat Pulau Hinako adalah pemberian Bibit Kelapa Hibrida Tahun 2019, namun sampai saat ini belum bisa dilihat hasilnya karena memerlukan waktu 3 (tiga) tahun untuk dapat dipanen.

Hasil dari usaha perikanan nelayan pada umumnya untuk kebutuhan konsumsi masyarakat sehari-hari. Pemerintah pernah memberikan bantuan pengadaan budidaya ikan kerapu, namun tidak berhasil. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pendampingan secara komprehensif oleh pemerintah sehingga hasilnya kurang maksimal walaupun telah dibentuk kelompok nelayan di Pulau Hinako. Sementara banyak nelayan besar yang berasal dari

wilayah lain menggunakan kapal besar dan peralatan pukat serta bom melakukan eksplorasi perikanan di perairan sekitar Kepulauan Hinako ini. Hal ini memberikan dampak rusaknya ekosistem laut Kepulauan Hinako. Aktivitas lainnya yang juga merusak lingkungan ekosistem laut adalah kehadiran kapal dari wilayah lain yang berlabuh di sekitar Kepulauan Hinako dengan tujuan untuk membuang sampah dan jangkar kapal juga turut menyebabkan kerusakan terumbu karang. Sarana transportasi berupa kapal speed boat telah diberikan oleh pemerintah sejumlah 3 (tiga) kapal yang dikelola oleh aparat desa.

Hal unik lainnya di Desa Hinako terdapat kuburan bertuliskan aksara Tionghoa (Cina), hal ini menandakan bahwa pelaut asal Cina telah sampai di Pulau Hinako dan mungkin saja sebagian kecil masyarakat hinako memiliki garis keturunan cina.



Gambar 13. Kuburan Cina di Desa Hinako Pulau Hinako

Dana desa yang diperoleh dari pemerintah digunakan untuk membangun sarana prasarana berupa pembangunan jalan beton, dermaga (berjumlah 3 dermaga di Desa Hanofa, Hinako dan Balowondrate) dan gedung serba guna.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat di Pulau Hinako bahwa mata pencaharian di bidang pertanian dan perikanan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Hinako. Pada subbab sosial ekonomi telah dibahas mengenai beberapa bantuan pemerintah dibidang pertanian dan perikanan namun bantuan tersebut tidak mampu memberikan hasil yang diharapkan. Artinya hasil perikanan dan pertanian tanaman kelapa hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pada saat pabrik pengolahan kelapa masih beroperasi di Pulau Hinako, kesejahteraan masyarakat meningkat karena adanya lapangan pekerjaan sebagai pekerja pabrik dan minyak kelapa yang dihasilkan berkualitas tinggi karena bahan baku utama kelapa yang langsung diperoleh di Pulau Hinako.

Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan pembangunan industri hilir yang memanfaatkan sumber daya yang dihasilkan di Kepulauan Hinako seperti pembangunan pabrik pengolahan minyak kelapa atau pabrik garam di Kecamatan Sirombu Pulau Nias apabila tidak memungkinkan membangun pabrik di Pulau Hinako. Pembangunan pabrik tersebut memberikan *multiplier effect* karena mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik di Pulau Hinako maupun di Kabupaten Nias Barat. Hasil produksi yang dihasilkan tentu akan memiliki hasil yang lebih berkualitas dan sumber bahan baku yang tidak jauh dibandingkan

dengan kondisi saat ini dimana kopra diangkut ke pabrik pengolahan minyak kelapa yang ada di Gunung Sitoli.

Sementara pelaku usaha pariwisata perorangan di pulau lain masih dalam satu gugusan Kepulauan Hinako yaitu Pulau Asu memiliki kesejahteraan yang sangat baik bahkan menjadi stakeholder bagi masyarakat di Pulau Asu dengan menyediakan lapangan pekerjaan di resort yang mereka dirikan dan menyediakan transportasi angkutan laut sebagai sarana angkutan hasil panen dan mobilisasi bagi masyarakat di Kepulauan Hinako. Sementara di Pulau Hinako belum ada sektor pariwisata yang dikembangkan padahal memiliki sumber daya pesisir yang sangat potensial seperti diving and fishing spot.

Peningkatan kelas dermaga baik di Pulau Hinako maupun di Sirombu juga dapat memunculkan *multiplier effect*, karena ketersediaan dermaga saat ini sangat kurang memadai untuk menyandar kapal besar. Hanya kapal-kapal kecil yang mampu bersandar sehingga barang-barang kebutuhan yang diangkut sangat terbatas. Mobilisasi barang menggunakan kapal besar akan jauh lebih efektif dan efisien dalam hal biaya transportasi dibandingkan kapal kecil. Tingginya mobilisasi baik barang dan penumpang berimplikasi terhadap tumbuhnya perekonomian masyarakat yang terjadi karena adanya pertukaran barang dan jasa masyarakat. Pada akhirnya akan menumbuhkan kantong-kantong pusat perekonomian masyarakat yang baru di Kepulauan Hinako.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini hanya sebatas menyajikan informasi hasil pengolahan data P4T di Pulau Hinako yang bisa dimanfaatkan sebagai data dasar perencanaan pengembangan wilayah di Pulau Hinako. Data Penguasaan dan Pemilikan Tanah Data P4T Pulau Hinako bisa menjadi salah satu data dasar dalam perencanaan program kegiatan yang dilaksanakan Kantor Pertanahanan seperti Reforma Agraria dengan legalisasi dan penataan aset pertanahan. Legalisasi aset tanah melalui program PTSL dan redistribusi tanah, Penataan Aset melalui kegiatan Konsolidasi Tanah dilanjutkan dengan pemberian akses terhadap sektor Pariwisata dengan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan sumber-sumber ekonomi baru bagi masyarakat pulau dalam mendukung pengembangan ekowisata. Data Penggunaan dan Pemanfaatan tanah bisa dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan program kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan bentuk fasilitasi beberapa program kegiatan beberapa *stakeholder* yaitu Sektor Pertanian dan Perkebunan. Hasil pendataan ketersediaan dan jumlah fasos dan fasum yang disajikan menjadi data pendukung sektor Pariwisata, Kesehatan dan Pembangunan Permukiman Masyarakat Desa dalam membangun infrastruktur utama dalam pengembangan ekowisata di Pulau Hinako. Gambaran masa lalu ekonomi masyarakat Pulau Hinako yang pernah berjaya pada saat dibangun industri pengolahan minyak kelapa memberikan pandangan bahwa sumber daya alam perkebunan kelapa yang tumbuh secara alami dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan dan perlu pengelolaan lebih lanjut oleh Sektor Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM. Keindahan dan kekayaan alam di Kepulauan Hinako yang tidak dimiliki di wilayah lain bisa menjadi daya tarik wisatawan

maka dibutuhkan kerja sama dan kesungguhan antar *stakeholder* untuk mengembangkan sebuah Kawasan Ekowisata Bahari di Kepulauan Hinako yang bertaraf nasional dan internasional.

Daftar Pustaka

- A. Seba, J. (2019). Ecotourism and Sustainable Tourism. In *Tourism and the Economy*. <https://doi.org/10.1515/9780824844776-016>
- Asmin, F. (2014). *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. 1. <https://books.google.co.id/books?id=JKzXXwAACAAJ>
- Dewi, L. D. R., Vera, N., Lokananta, A. C., Wihardi, D., & Alexandre, N. (2021). The Tourism Development Strategies of Hinako Islands in West Nias in Increasing the Regional Original Revenue and the Local People's Welfare. *Journal of Social and Political Sciences*, 4(4). <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.04.325>
- Kurniawan, F., Adrianto, L., Bengen, D. G., & Prasetyo, L. B. (2016). Vulnerability assessment of small islands to tourism: The case of the Marine Tourism Park of the Gili Matra Islands, Indonesia. *Global Ecology and Conservation*, 6, 308–326. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2016.04.001>
- Liliyani, P., Nugroho, T., & Titik Andari, D. W. (2020). Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif di Kabupaten Madiun. *Tunas Agraria*, 3(2), 157–176. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.114>
- Muh Arif Suhattanto. (2017). Membangun Administrasi Pertanahan Indonesia Sebagai Sarana Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Dengan Pendekatan Tepat Guna. *Prosiding Seminar Nasional*, 1(69), 5–24. <http://repository.stpn.ac.id/183/1/2> Membangun Administrasi Pertanahan Indonesia Sebagai Sarana Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.pdf
- Perikanan, J. T., Kelautan, D., Koroy, K., Yulianda, F., Butet, N. A., Perikanan, F., Kelautan, I., & Pertanian Bogor, I. (2017). Pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Sumberdaya Pulau-Pulau Kecil di Pulau Sayafi dan Liwo, Kabupaten Halmahera Tengah. In *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan* (Vol. 8).
- Salean, S.T. (2017). Paradigma Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir. *Jurnal Ilmiah Plano Krisna*, Vol.13(1)
- Sharpley, R. (2009). *Tourism, Environment and Development Series Tourism Development and the Environment: Beyond Sustainability?*
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung
- Waluyo, Adi. (2013). Permodelan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Secara Terpadu Yang Berbasis Masyarakat (Studi Kaus Pulau Raas Kabupaten Sumenep Madura). *Jurnal Kelautan*. Vol.6(1)